Jurnal Ilmiah
SAMUDRA AKUATIKA
Volume 7 (2) Desember 2023: 79–87

p-ISSN: 2621-5314
e-ISSN: 2614-6738
DOI: 10.33059/jisa.v7i2.9116

Implementasi Konsep *Blue Economy* di Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan *Sutainable Development Goals* (SDgs) 14: *Life Below Water*

Implementation of the Blue Economy Concept in Indonesia as an Effort to Realize Sustainable Development Goals (SDgs) 14: Life Below Water

Aprilia[1,✉], **Erni Mulyanie**[1]

[1]Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia
✉Email: aprilia.202170042@gmail.com

Abstrak: Pada sektor *marine living* secara khusus lingkup perikanan tangkap dan budidaya, Indonesia masih mengalami kesulitan untuk memenuhi standar keberlanjutan. nilai keberlanjutan perikanan Indonesia dalam *Ocean Health Index* (OHI) yang berada pada urutan 175 dari 220 negara dalam indikator *food provision* yang menghitung ketahanan pangan dari sumber daya maritim dengan kemampuan menyeimbangkan antara ekologi dan eksploitasi. Penurunan keseimbangan ekologis seperti daya dukung laut diakibatkan karena konservasi yang kurang berorientasi pada pengelolaan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan konsep *blue economy* di Indonesia dalam upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 14: *life below water*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi literatur menggunakan teknik analisis deskriptif. Salah satu pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia adalah pada sektor perikanan dan pertambangan. Produksi perikanan tangkap di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 total produksi ikan tangkapan pada tahun 2017 sebesar 6.424.114 ton, tahun 2018 sebesar 6.701.834 ton, dan tahun 2019 sebesar 7.164.302 ton. Sementara itu, sektor energi dan sumber daya mineral masih memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Subsektor minyak dan gas bumi memberikan kontribusi terbesar pada sektor energi dan sumber daya mineral selama tiga tahun terakhir, dengan rata-rata kontribusi sebesar 30% terhadap PDB. Melalui konsep *blue economy*, merupakan konsep yang menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan pesisir serta mendorong pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan perekonomian di sektor industri kelautan dan perikanan. Strategi penerapan konsep ekonomi biru tentunya relevan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 14, yaitu *life below water* atau ekosistem laut.

Kata kunci: Ekonomi Biru, Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Kelautan.

Abstract: *in the marine living sector, specifically in the capture and aquaculture sector, Indonesia is still experiencing difficulties in meeting sustainability standards. The sustainability value of Indonesian fisheries in the Ocean Health Index (OHI) is ranked 175th out of 220 countries in the food provision indicator which calculates food security from maritime resources with the ability to balance ecology and exploitation. The decline in ecological balance, such as the carrying capacity of the sea, is caused by conservation that is less oriented towards sustainable management. This research aims to describe the application of the blue economy concept in Indonesia in an effort to realize Sustainable Development Goals (SDGs) 14: life below water. The method used in this research is the literature study research method using descriptive analysis techniques. One of the uses of marine resources in Indonesia is in the fisheries and mining sectors. Capture fisheries production in Indonesia has increased every year, based on data from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in 2019, the total production of captured fish in 2017 was 6,424,114 tonnes, in 2018 it was 6,701,834 tonnes, and in 2019 it was 7,164,302 tonnes. Meanwhile, the energy and mineral resources sectors still make a major contribution to national development. The oil and gas subsector has made the largest contribution to the energy and mineral resources sector over the last three years, with an average contribution of 30% to GDP. Through the blue economy concept, it is a concept that ensures the preservation of marine resources and the coastal environment and encourages the use of resources to improve the economy in the marine and fisheries industrial sector. The strategy for implementing the blue economy concept is certainly relevant to the Sustainable Development Goals (SDGs) point 14, namely life below water or marine ecosystems.*

Keywords: Blue Economy, Sustainable Development, Goals (SDGs), Marine Resources.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai *archipelagic state* atau negara kepulauan dimana jarak antar pulau dipisahkan oleh perairan, terkhusus oleh lautan. Laut Indonesia memiliki luas sekitar 7,9 juta km^2 dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setara dengan 14% dari garis pantai di dunia atau sepanjang 81.791 km (Supriharyono, 2002 dalam Farhani, 2022). Secara geografis lautan dibagi kedalam tiga permukaan yaitu *surface sea waters* (permukaan), *deep ocean waters* (dasar laut), *dan very deep ocean waters* (tanah dibawah dasar laut). Pada permukaan laut merupakan tempat dimana sumberdaya hayati dan mikroorganisme dapat hidup, selanjutnya pada dasar laut beberapa mineral mulai ditemukan, sedangkan pada tanah bagian dasar lebih banyak mineral yang dapat ditemukan (Puspitawati, 2018). Laut Indonesia kaya akan diversifikasi biota dan potensi mencakup berbagai aspek seperti perikanan, pertambangan, energi, hutan mangrove, rumput laut, hingga wisata bahari (Banu, 2020). Pemerintah indonesia sadar akan potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar, hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Mennegah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang memuat penetapan pembangunan perekonomian berbasis kemaritiman sebagai salah satu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 bahwa jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dari 12,01 juta ton pertahunnya adalah sebesar 8,6 juta ton (BPS, 2022). Namun pada sektor *marine living* secara khusus lingkup perikanan tangkap dan budidaya, Indonesia masih mengalami kesulitan untuk memenuhi standar keberlanjutan. Hal ini tercermin dari rendahnya nilai keberlanjutan perikanan Indonesia dalam *Ocean Health Index* (OHI) yang berada pada urutan 175 dari 220 negara dalam indikator *food provision* yang menghitung ketahanan pangan dari sumber daya maritim dengan kemampuan menyeimbangkan antara ekologi dan eksploitasi (Makmur et al., 2022). Kelimpahan sektor kelautan yang ada di Indonesia apabila di eksploitasi secara masif akan mengakibatkan tekanan dan tantangan pada sektor kelautan yang kemudian menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas dari komoditas utama sumberdaya kelautan (Akbar, 2022). Ekosistem laut yang mengalami penurunan keseimbangan secara ekologis seperti menurunnya daya dukung laut merupakan akibat dari konservasi yang kurang berorientasi pada pengelolaan secara berkelanjutan (Syarif, 2021).

Kehadiran Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda bersama dimana agenda ini merupakan lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dirancang sebagai jalan keluar dari segala bentuk krisis perubahan iklim dan lingkungan (Gumelar & Al-fatih, 2021). SDGs ini bertujuan untuk upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, membangun kehidupan sosial yang berkelanjutan, menjaga kualitas lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup antar generasi (Nudia & Desfandi, 2023). SDGs merupakan bentuk komitmen global dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 17 tujuan utama. Salah satu tujuan utama dari SDGs adalah melindungi ekosistem laut atau *life below water* yang tertuang dalam poin ke-14 dalam tujuan SDGs. Upaya dari SDGs dalam bidang kelautan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan secara *sustainable*. Kegiatan pemanfaatan ruang laut memiliki karakteristik yang khas, untuk dapat memanfaatkan ruang laut diperlukan berbagai saran prasarana termasuk teknologi yang tentu memegang peran penting. Selain itu karakteristik masyarakat dalam memanfaatkan ruang laut tentu berbeda sehingga perlu ada kebijakan yang

dapat menentukan pengelolaan ke arah yang berkelanjutan (Priyanta, 2021).

Dalam mewujudkan SDGs pemerintahan Indonesia telah membuat kebijakan kelautan Indonesia berbasis ekonomi biru (*blue economy*) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. *Blue economy* di Indonesia dapat difokuskan pada sektor perikanan, pertambangan, dan energi, yang merupakan aspek penting dalam pemanfaatan sumber daya laut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sari & Muslimah, 2020). Selain itu dalam penelitian Y. A. Wahyuddin et al., (2022) bahwa tujuan penerapan *blue economy* adalah untuk mendukung suksesnya SDGs dan melakukan konservasi ekosistem laut hingga 2030 dengan alternatif penggabungan konsep *green economy* dan *blue economy* dengan syarat Indonesia mampu memberhentikan segala bentuk tindakan eksploitatif yang berdampak pada keuntungan nasional yang kemudian seharusnya dialihkan pada eksloprasi dengan teknik yang inovatif. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi konsep *blue economy* di indonesia sebagai upaya mewujudkan sdgs 14: *life below water*.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi literatur menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menganalisis data dari artikel yang relevan dengan konsep *blue economy* untuk menciptakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 14 *life below water*. Studi literatur dilakukan dengan fokus pada artikel relevan, juga ditambahkan dengan beberapa data pendukung dari website resmi seperti *World Bank*, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Adapun kriteria yang digunakan meliputi artikel yang terbit dalam rentang waktu 5 tahun (2018-2023), artikel berkaitan dengan topik utama terkait konsep *blue economy*, dan artikel termuat pada *open source journal* yang kredibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut Sektor Perikanan di Indonesia

Sumber daya perikanan dan biota laut pada hakekatnya ialah sumberdaya yang bersifat *common property* (milik bersama) yang menyebabkan tidak seorangpun yang memiliki hak khusus untuk memiliki sendiri atau mencegah orang lain untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada (Rahmadan, 2022). Sektor perikanan terbesar di dunia dengan nilai sekitar USD21 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dimiliki oleh Indonesia (Nasution, 2022). Keragaman komoditas perikanan di Indonesia berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kementrian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa besaran potensi sumber daya perikanan sebesar 12,01 juta ton/tahun yang terdiri dari berbagai jenis ikan. Produksi ikan tangkap di Indonesia meningkat sejak tahun 2000 hingga 2018 sebesar 2,7 ton. Dan pada 2019 produksi ikan tangkap di Indonesia mencapai 6,6 juta ton. Indonesia memiliki 11 wilayah pengelolaan perairan dengan potensi perikanan yang besar. Potensi lestari dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan pada masing-masing wilayah di Indonesia berbeda berdasarkan wilayah pengelolaan perairannya. Sumber daya laut indonesia terdiri dari 37% spesies ikan yang ada di dunia. Beberapa diantaranya adalah ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti lobster, ikan karang, tuna, rumput laut, lobster, udang, dan berbagai jenis ikan hias. Berdasarkan data Badan Pusat Statstik bahwa terdapat 10 jenis komoditas ikan tangkap yang ada di Indonesia yaitu ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, ikan kakap, ikan kembung, ranjungan, laying, dan udang Produksi perikanan tangkap di Indonesia meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Kementrian Kelautan

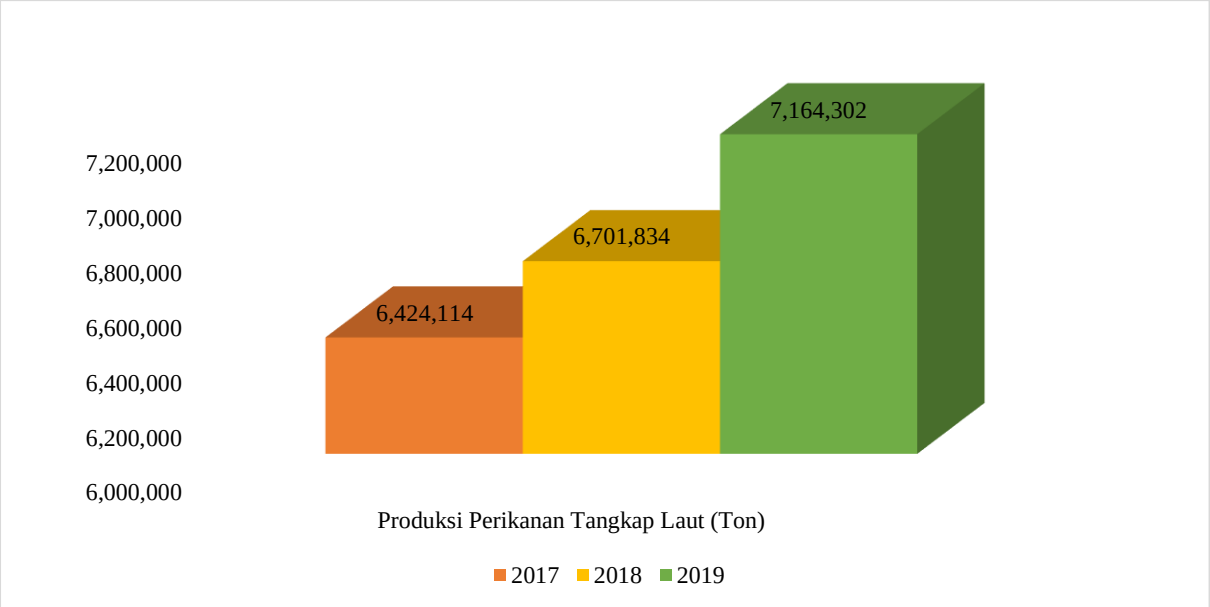
dan Perikanan (2019) bahwa jumlah produksi ikan tangkap yaitu pada tahun 2017 sebanyak 6.424.114 Ton, pada 2018 sebanyak 6.701.834 Ton, dan pada 2019 sebanyak 7.164.302 Ton.

Pada sektor perikanan Indonesia menjadi nomor satu di kawasan Asia Tenggara. Ekspor Indonesia pada komoditas perikanan selalu meningkat sebesar 11-12% setiap tahunnya, bahkan pada 2018 mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu sebesar 12,7% (Maini, 2019 dalam (Abd. Kholik Khoerulloh et al., 2020). Pada tahun 2021 di semester II sekotor perikanan telah menyumbang 67,7 triliun sedangkan pada twieulan II sebesar 2,44% dari PDB. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,2 miliar US$ (BPS, 2021 dalam Pratiwi et al., 2022). Meski nilai ini belum dapat dikatakan optimal apabila dikaitkan dengan potensi dan kelimapahan sumber daya laut dan perikanan di Indonesia. Kelimpahan sumber daya perikanan di Indonesia apabila terus menerus di eksploitasi akan mengakibatkan tekanan dan terjadinya penurunan baik dari segi kuantitas ataupun kualitas. Proses eksploitasi terhadap sumber daya perikanan harus memperhatikan dampaknya, agar tidak menimbulkan kerugian terhadap ekosistem dan kondisi perairan (Nugroho & Budianto, 2021).

Tabel 1. Potensi lesatri dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan WPP

WPP	Potensi Lestari	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (Ton)
571	425.444	340.355
572	1.240.975	992.780
573	1.267.540	1.014.032
711	767.126	613.701
712	1.341.632	1.073.306
713	1.177.857	942.286
714	788.939	631.151
715	1.242.526	994.021
716	597.139	477.711
717	1.054.695	843.756
718	2.637.565	2.110.052

Sumber: Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2002 dalam (Akbar, 2022)



Gambar 1. Peningkatan Produksi Ikan Tangkap di Indonesia

Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut Sektor Pertambangan di Indonesia

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) ialah konvensi internasional yang mengatur hampir seluruh aspek tentang pemanfaatan wilayah laut. UNCLOS 1982 mengatur pemanfaatan wilayah kelautan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Pembagian zona maritim Indonesia apabila dilihat dalam UNCLOS 1982 menjadikan wilayah laut Indonesia begitu luas. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya laut yang besar termasuk sumber daya pada sektor pertambangan termasuk sumber daya mineral. Potensi penambangan bawah laut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sumber daya laut bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti sebagai sumber energi, bahan pembangunan infrastruktur, dan perhiasan. Fokus utama dari penambangan bawah laut lebih kepada *aggregate* (di dalamnya termasuk pasir), berlian, sulfur, emas, garam, magnesium, dan mineral lainnya yang dapat ditemukan di kawasan pesisir atau laut dangkal (Puspitawati et al., 2021). Berdasarkan hasil survey geologi kelautan mengindikasikan bahwa sumberdaya mineral lautan Indonesia yang dapat dieksploitasi secara ekonomis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Timah Putih; Sumberdaya mineral sangat terkenal pada sektor industri pertambangan Indonesia sebagai sumberdaya mineral lautan. Endapan timah putih ini ditemukan di sekitar pulau Bangka dan Belitung pada zona batuan granit yang membentang dari Malaysia hingga Thailand.
2. Mineral Radioaktive; Batuan granit pembawa timah berpotensi membawa mineral radioaktive seperti Thorium (Th). Sehingga potensi mineral radioaktive banyak terendap disekitar pulau Bangka dan pulau Belitung.
3. Chromite; secara geologis, endapan chromite sangat dekat dengan batuan ophiolitik ultra basa yang banyak ditemukan di sekitar Selawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
4. Phosporite; Mineral ini terdapat sekitar selatan pulau Timor. Mineral Phosphorite terendap pada kedalaman sekitar 30 – 300 m.
5. Metalic Muds; Mineral ini terbentuk oleh aktivitas hydrothermal pada temperatur tinggi. Mineral metalic muds banyak terdapat di sekitar pulau Sangihe dekat Gunung berapi Api Awo.
6. Pasir Besi; Mineral pasir besi sangat terdapat di pantai selatan pulau Jawa dan merupakan salah satu komoditi ekspor Indonesia.
7. Manganese Nodules; Endapan mineral ini sangat populer keterdapatannya di laut dalam dan sangat besarkemungkinan keberadaanya di sekitar laut dalam yang mengelilingi wilayah kepulauan seluruh Indonesia .

Sampai saat ini, sektor energi dan sumber daya mineral masih berkontribusi besar pada pembangunan bangsa. Subsektor minyak dan gas bumi memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor energi dan sumber daya mineral terhadap APBN selama tiga tahun terakhir, dengan kontribusi rata-rata 30% terhadap GDP (Hartanto & Sartini, n.d.).

Penerapan Konsep *Blue Economy* di Indonesia

Blue economy adalah konsep pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian, dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan sumber daya secara jangka panjang (World Bank, 2021). Gunter Pauli merupakan seorang pendiri sekaligus aktivis *Zero Emission Research Initiative* (ZERI). Konsep *Blue economy* pertama kali diperkanalkan melalui bukunya yang berjudul "*The Blue Economy*" dengan landasan "*10 years, 100 innovations, and 100 million jobs*". Konsep *blue economy* ini merujuk pada penggunaan sumberdaya alam yang efisien dan tidak merusak

lingkungan. Menurut *National Marine Environmental Monutoring Center* Dalian, China bahwa blue economy merupakan kekuatan ekonomi laut. *Blue economy* mengedepankan beberapa prinsip yaitu:

1. *Nature's efficiency* (Efisiensi alam), merupakan prinsip dimana ekonomi biru mencontoh pada ekosistem, bekerja sesuai dengan apa yang disediakan oleh alam dengan efisien dan tidak mengurangi justru memperkaya alam.
2. *Zero waste* (Nir limbah), merupakan prinsip dimana energi didistribusikan secara efisien dan merata, bekerja menuju tingkat efisiensi yang tinggi tanpa meninggalkan limbah.

Konsep *blue economy* berupaya untuk menjamin kelestarian dari sumber daya kelautan dan lingkungan pesisir serta mendorong pemanfaatan sumber daya untuk mendorong ekonomi pada sektor industri kelautan dan perikanan. Manifestasi kebijakan *blue economy* di Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki dua target yaitu peningkatan keanekaragaman hayati dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan kawasan konservasi belum memenuhi indikator efektivitas dari segi pengelolaan yang disebabkan oleh orientasi dan target terfokus pada upaya perluasan kawasan dan penetapan secara *paper park*. Kemudian ekslusi nelayan kecil melalui peningkatan ikan terukur sejak dikeluarkannya PP No.11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Selain itu konflik pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tumpang tindih antar sektor dan pelaku yang belum terharmonisasi.

Meskipun demikian, pada beberapa kawasan di Indonesia sudah mecoba menerapkan konsep *blue economy*. Misalnya, penelitian di Kenjeran Surabaya menunjukkan bahwa dari empat prinsip dan indikator yang menjadi acuan untuk menerapkan konsep *blue economy* di wilayah pesisir, tiga telah diterapkan, dan satu lagi masih dalam tahap pengejaran. Di sisi lain, penelitian di Kota Sabang menunjukkan bahwa implementasi konsep *blue economy* telah memberikan efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Strategi Implementasi *Blue Economy* di Indonesia untuk Mewujudkan SDGs 14: *Life Below Water*

Indonesia berkomitmen untuk mengalokasikan 10% dari wilayah perairann atau sekitar 32,5 juta hektar, sebagai kawasan perlindungan laut pada tahun 2030. Strategi implementasi konsep *blue economy* tentu relevan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 14 yaitu *life below water* atau ekosistem laut. Hal ini relevan dengan misi ketujuh kebijakan pembangunan kelautan nasional dalam RPJPN 2005–2025, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hingga akhir kuartal ketiga tahun 2021, sekitar 28,4 juta hektar kawasan perlindungan laut atau *Marine Protected Area* (MPA) telah ditetapkan dengan pembagian pemerintah pusat mengelola 9,9 juta hektar dan pemerintahan daerah mengelola 18,5 juta hektar. Pembentukan MPA diharapkan dapat memastikan pemanfaatan sumber daya laut terlaksana secara berkelanjutan. Dengan sistem zonasi yang digunakan kawasan laut Indonesia dibagi atas 4 zona berdasarkan pemanfataannya yaitu zona tertutup, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya.

Indonesia adalah negara pertama dan satu-satunya di ASEAN yang berbagi data Sistem Pemantauan Kapal dengan *Global Fishing Watch*, sebuah platform LSM yang berusaha meningkatkan transparansi kegiatan penangkapan ikan ilegal. Fokus utama pemerintah Indonesia adalah ekonomi laut yang berkelanjutan, yang menghasilkan kebijakan khusus, struktur kelembagaan, dan alat kebijakan yang terintegrasi. Untuk mempermudah tata

kelola laut, Indonesia membentuk Kemenko Marves dan menetapkan strategi kebijakan laut khusus yang berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk meningkatkan tata kelola laut negara, sejumlah struktur ad hoc dibuat dengan fokus utama pada penangkapan *illegal fishing* dan *unreported and unregulated* (IUU) *fishing*. Indonesia berkontribusi pada Pedoman Pencegahan Masuknya Ikan dan Produk Perikanan dari Kegiatan IUU *Fishing* ke dalam Rantai Pasokan.

Selain itu, dalam rangka mengejar penurunan emisi, Indonesia meningkatkan target tersebut menjadi 31,89% di tahun 2030. Untuk mendukung hal tersebut terdapat 5 program blue economy yang didorong oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui 1) Perluasan target kawasan konservasi perairan, 2) penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota tangkap, 3) pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan terkhusus pada komoditas ekspor (udang, rumput laut, lobster, dan kepiting), 4) pengelolaan berkelanjutan kawasan pesisir, dan 5) penanganan sampah plastik di laut (program Bulan Cinta Laut) (Wicaksana & Rachman, 2018).

IV. KESIMPULAN

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) ialah konvensi internasional yang mengatur hampir seluruh aspek tentang pemanfaatan wilayah laut. UNCLOS 1982 mengatur pemanfaatan wilayah kelautan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Salah satu pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia yaitu pada sektor perikanan dan pertambangan. Sumber daya laut indonesia terdiri dari 37% spesies ikan yang ada di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statstik bahwa terdapat 10 jenis komoditas ikan tangkap yang ada di Indonesia yaitu ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, ikan kakap, ikan kembung, ranjungan, laying, dan udang. Produksi perikanan tangkap di Indonesia meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (2019) bahwa jumlah produksi ikan tangkap yaitu pada tahun 2017 sebanyak 6.424.114 Ton, pada 2018 sebanyak 6.701.834 Ton, dan pada 2019 sebanyak 7.164.302 Ton. Sedangkan pada sektor energi dan sumber daya mineral masih berkontribusi besar pada pembangunan bangsa. Subsektor minyak dan gas bumi memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor energi dan sumber daya mineral terhadap APBN selama tiga tahun terakhir, dengan kontribusi rata-rata 30% terhadap GDP.

Konsep *blue economy* berupaya untuk menjamin kelestarian dari sumber daya kelautan dan lingkungan pesisir serta mendorong pemanfaatan sumber daya untuk mendorong ekonomi pada sektor industri kelautan dan perikanan Strategi implementasi konsep *blue economy* tentu relevan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 14 yaitu *life below water* atau ekosistem laut. Hal ini relevan dengan misi ketujuh kebijakan pembangunan kelautan nasional dalam RPJPN 2005–2025, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hingga akhir kuartal ketiga tahun 2021, sekitar 28,4 juta hektar kawasan perlindungan laut atau *Marine Protected Area* (MPA) telah ditetapkan dengan pembagian pemerintah pusat mengelola 9,9 juta hektar dan pemerintahan daerah mengelola 18,5 juta hektar. Pembentukan MPA diharapkan dapat memastikan pemanfaatan sumber daya laut terlaksana secara berkelanjutan.

V. REKOMENDASI DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan fokus kajian konsep *blue economy* dan kearifan lokal masyarakat pesisir dalam upaya mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs)

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Kholik Khoerulloh, Sobana, D. H., Asih, V. S., & Yusup, D. K. (2020). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Ekonomi Syariah*, *1*(1), 1–11.

Akbar, I. (2022). Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, *4*(1), 17–22.

Banu, N. M. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *22*(1), 27–31. https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1907

BPS. (2022). Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2022. *Badan Pusat Statistik*, Katalog BPS / BPS Catalogue : 3312002.

Farhani, A. (2022). Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat. *Adalah*, *6*(2), 25–39. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26766

Gumelar, R. A., & Al-fatih, R. W. (2021). Pencarian Informasi Mengenai Sustainlable Developmpent Goals (SDGs) " Life BelowWater ." *Journal of Computer, Electronic and Telecommunication*, *1*(1), 1–17.

Hartanto, B., & Sartini, S. (n.d.). KEBIJAKAN PEMANFAATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA ENERGI MINERAL KELAUTAN INDONESIA. *Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta (STiMARYO)*, 90–106.

Makmur, K., Sugianto, D. N., Yonvitner, Damanik, R., Noor, R., Lestari, I., Marzuki, F. R., Putra, R. D., Aryanti, D., Handayani, E. P., Lesdantina, D., Adrianto, L., Muawanah, U., & Fariza, F. (2022). Prospek Ekonomi Biru bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia. In *Suparyanto dan Rosad (2015* (Vol. 5, Issue 3).

Nasution, M. (2022). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget*, *7*(2), 340–364.

Nudia, I., & Desfandi, M. (2023). Peran Panglima Laot Dalam Menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Bidang Kelestarian Laut Di Gampong Ujong Pie Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, *8*(1.1), 104–114. https://doi.org/10.24815/jpg.v8i1.1.31873

Nugroho, untung A., & Budianto, F. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Majalah Media Perencana*, *2*(1), 51–67. https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/20/13

Pratiwi, Y. D., Saputra, D. E., Tallo, D. K. O., & Dewanti, E. T. (2022). Politik Hukum Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan Dan Penangkapan Ikan Terukur Dalam Pembangunan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, *6*(3), 362–385. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.283

Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(1), 20. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361

Puspitawati, D. (2018). Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Advances in*

Economics, Business and Management Research, *59*, 72–76. https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.18

Puspitawati, D., Putra, T. M., & Wardana, R. V. (2021). Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *10*(4), 716–739. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p05

Rahmadan, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir PENDAHULUAN Indonesia memiliki biodiversitas sumber daya laut terbesar di dunia karena memiliki kekhasan ekosistem pesisir d*. *6*(1), 18–32.

Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *423*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012051

Syarif, E. (2021). Kearifan Konservasi Sumberdaya Laut Nelayan Tradisional Bajoe Sulawesi Selatan, Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, *3*(2), 113. https://doi.org/10.29300/ijsse.v3i2.4826

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Rambu Rambu Kebijakan Ekonomi Biru di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *3*(1), 10–27. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

World Bank. (2021). Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia. *The World Bank*, 1–80.

Y. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat, & Tri Ridho Verdiansyah. (2022). Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era JokoY. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat, and Tri Ridho Verdiansyah, 'Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pad. *Sriwijaya Journal of International Relations*, *2*(2), 70–87.